

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara umum bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara sudah berjalan semestinya, karena perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi pun lebih mudah menjadikan fungsi kehumasan berada di setiap lapisan pegawai LAN. Pada tahun 2019 terbitlah Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dari Peraturan Kepala LAN Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Terbitnya Perka LAN Nomor 22 Tahun 2019 belum serta merta diimbangi dengan implementasi terhadap kebijakan tersebut, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu dibenahi kembali.

Pada teori implelementasi kebijakan George C. Edward dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik didasari oleh 4 aspek yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap dan aspek struktur birokrasi dan keempat aspek ini yang saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan teori yang disertai dengan uji lapangan dalam bentuk wawancara dengan berbagai *Key Informan*, maka penulis memberikan simpulan:

1. Ditinjau dari Faktor Komunikasi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara terjalin baik karena komunikasi antar unit/satker dilakukan secara formal maupun informal sudah bekerjasama dengan baik, hingga berhasil pemberian informasi publik mendapatkan predikat Badan Publik yang INFORMATIF dari Komisi Informasi Publik pada tahun 2020. Pada faktor ini terdapat tiga aspek yang berpengaruh pada komunikasi yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi yang mana ketiganya saling berkaitan dan mempengaruhi implementasi Perka ini.
2. Ditinjau dari Faktor Sumber Daya, Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dari segi kuantitas pranata humas yang bertugas untuk melakukan pelayanan informasi hanya berjumlah setengah dari jumlah yang dibutuhkan di humas karena masih adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh pranata humas yang aktif pada unit humas dan kualitas SDM pelaksana dianggap sudah cukup hanya perlu ditambahkan dibagian pemenuhan informasi publik. Sarana dan prasarana juga tersedia dengan baik. Dari segi kewenangan tidak semua informasi dipahami oleh PPID, sehingga masih perlu pemberian informasi langsung ke unit/satker terkait.
3. Ditinjau dari Faktor Disposisi/Sikap, dukungan unsur pimpinan sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, namun

dalam tataran dibawahnya masih belum adanya kesepahaman terkait pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik, faktor lain ialah inisiatif pelaksana teknis.

4. Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi sudah baik hal ini dilihat dari Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sudah tersedia pembagian tugasnya pun sudah jelas. Struktur birokrasi disini merupakan wujud konsistensi intansi/organisasi dalam menjalankan kebijakan dengan tertib.

Keempat poin diatas merupakan indikator yang digunakan untuk mendeskripsikan pengelolaan informasi yang terkait dengan Perka LAN Nomor 22 Tahun 2019 di LAN RI. Tentunya, keempat poin diatas saling terkait satu sama lain. Dimana pembinaan sumber daya manusia yang baik akan mengarahkan pada kelancaran komunikasi antar pihak terkait, pengenalan struktur birokrasi yang efektif, dan sikap yang sesuai. Adapun komunikasi yang baik akan terwujud apabila dalam penyampaian, disertai sikap yang baik juga. Sedangkan komunikasi yang efektif akan terbina apabila semua pihak mengetahui struktur birokrasi, sehingga alur komunikasi akan sesuai pada pedoman/peraturan yang berlaku

B. Saran

1. Faktor Komunikasi, Perlu ada sosialisasi secara menyeluruh dari substansi Perka LAN Nomor 22 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada pelaksana kebijakan

terutama dalam tataran teknis/lapangan seperti PPID pelaksana teknis dan petugas meja informasi, sehingga terdapat kesepahaman tentang pentingnya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

2. Faktor Sumber Daya, Peningkatan kualitas SDM perlu terus dikembangkan terutama bagi pelaksana kebijakan yang memerlukan kompetensi khusus dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi, perlu ada koordinasi dengan setiap pimpinan di unit kerja agar tercipta kesepahaman yang sama sehingga setiap informasi yang berada di unit kerja dapat dikumpulkan dan dikelola oleh PPID yang disimpan juga pada arsip.
3. Faktor Sikap/Disposisi, perlu ditingkatkan lagi kesadaran bagi tiap pegawai maupun pimpinan tentang betapa pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik selain diatur dalam undang-undang juga mempertahankan LAN menjadi Badan Publik yang bersifat informatif.
4. Faktor Struktur Birokrasi, Koordinasi PPID LAN Pusat dan PPID LAN Daerah diperlukan minimal 1 (satu) tahun sekali dalam pemutakhiran informasi dibawah koordinasi atasan PPID, konsistensi dalam menjalankan standar operasional prosedur oleh setiap pelaksana kebijakan.

5. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti variabel kebijakan Edward III dengan metode penelitian yang berbeda.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, Yudi (2016) *TEORI & ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Alfabeta, Bandung.
- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Agus, Salim. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana).
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasmad, Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar Kedai Aksara

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju

Sutabri, Tata. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

B. Jurnal

Ilyas. 2016. Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. Jurnal Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Semarang. 2(1): 94

Maria, Marthen Alfon. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 1(1): 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik